

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Mursyidi¹, Nurul Azkar²

Program Studi Magister Administrasi Publik

Universitas Lambung Mangkurat

e-mail: mursyidibrb@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan menggunakan enam variabel evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Evaluasi dilakukan pada lima tahapan kebijakan, yaitu tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Latar belakang penelitian didasarkan pada kondisi bahwa hingga tahun 2020 pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih menerapkan paradigma kumpul–angkut–buang. Sejak tahun 2021, kebijakan mulai bergeser menuju paradigma kumpul–angkut–pilah–olah–buang, seiring diberlakukannya Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 66 Tahun 2018. Namun demikian, pencapaian target pengelolaan sampah masih belum optimal. Pada tahun 2021, realisasi hanya mencapai 72,35% dari target 98%; tahun 2022 sebesar 77,31% dari target 99%; dan tahun 2023 sebesar 85,31% dari target 99%. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan realisasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Data dianalisis dengan metode analisis interaktif, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Temuan pada penelitian ini adalah bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dinilai kurang efektif. Pada tahap perencanaan, sudah tersedia dokumen PTMP sebagai pedoman dan peta jalan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dan penentuan target capaian pengelolaan sampah di daerah. Pada tahap penganggaran, alokasi anggaran masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan operasional, jumlah armada, dan pengembangan TPS/TPS3R, hal ini berdampak pada efisiensi dan pemerataan layanan yang belum optimal untuk mencakup seluruh kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada tahap pelaksanaan, penanganan sampah sudah berjalan sesuai dengan SOP namun belum optimal dalam pengurangan sampah, khususnya pada aspek pemilahan sampah rumah tangga masih sangat rendah, bank sampah belum optimal dalam membantu mengurangi sampah, dan penegakan regulasi belum tegas. Kondisi ini menunjukkan efektivitas dan ketepatan pelaksanaan belum tercapai sepenuhnya. Dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana, jumlah armada angkutan sampah masih terbatas dan sebagian besar sudah berumur tua dan tidak layak, jumlah bank sampah dan TPS/TPS3R belum merata di semua kecamatan, dan fasilitas pengolahan sampah belum optimal. Hal ini berdampak pada kecukupan dan efisiensi pengelolaan sampah. Kemudian dari sisi ketersediaan sumber daya manusia, belum mencukupi baik dari segi jumlah maupun kompetensi, sehingga efektivitas dan ketepatan kinerja pengelolaan sampah belum optimal.

Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor penghambat utama pengelolaan sampah, meliputi keterbatasan sumber daya (anggaran, sarana prasarana, dan SDM), kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau, kendala teknis operasional seperti usia armada dan tingginya biaya operasional, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya kelembagaan dan koordinasi lintas sektor.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat perubahan paradigma dan upaya peningkatan, kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah kurang efektif, terutama karena kendala perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, ketersediaan sarana dan prasarana, dan kecukupan SDM. Penelitian ini memberikan rekomendasi berupa penguatan perencanaan berbasis data, peningkatan anggaran berbasis kinerja, optimisasi implementasi 3R, penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, penambahan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola sampah, peningkatan edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat, serta penguatan kolaborasi multipihak dalam pelaksanaan penanganan dan pengurangan sampah. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dan mendukung pencapaian target pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: evaluasi kebijakan, pengelolaan sampah, William N. Dunn, implementasi kebijakan, Hulu Sungai Tengah.

ABSTRACT

This study aims to evaluate waste management policy in Hulu Sungai Tengah Regency using six policy evaluation variables according to William N. Dunn: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The evaluation was conducted at five policy stages: planning, budgeting, implementation, availability of facilities and infrastructure, and human resources. The background of this research is based on the fact that until 2020, waste management in Hulu Sungai Tengah Regency still applied the collect-transport-dispose paradigm. Since 2021, the policy has shifted to the collect-transport-sort-process-dispose paradigm, following the enactment of Hulu Sungai Tengah Regent Regulation Number 66 of 2018. However, the achievement of waste management targets has not been optimal. In 2021, realization only reached 72.35% of the 98% target; in 2022, it was 77.31% of the 99% target; and in 2023, it was 85.31% of the 99% target. This indicates a significant gap between target and realization.

This research used a qualitative descriptive approach, with data collection techniques including in-depth interviews, field observations, and document analysis. Data were analyzed using interactive analysis methods, including data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The findings of this study indicate that waste management policies in Hulu Sungai Tengah Regency are considered ineffective. At the planning stage, the PTMP document is available as a guideline and roadmap for the local government in implementing waste management and determining waste management achievement targets in the region. At the budgeting stage, budget allocation remains very limited compared to operational needs, fleet size, and TPS/TPS3R development. This impacts the efficiency and equity of services that are not optimal in covering all sub-districts and villages in Hulu Sungai Tengah Regency. During the implementation phase, waste management has been carried out in accordance with SOPs, but its effectiveness in waste reduction remains suboptimal. This is particularly true in household waste sorting, with waste banks not yet optimally contributing to waste reduction, and regulatory enforcement lacking. This situation indicates that implementation has not been fully effective and accurate. In terms of facilities and infrastructure availability, the number of waste collection vehicles is still limited, with most being old and unsuitable. The number of waste banks and TPS/TPS3R (Recycling Sites) is not evenly distributed across all sub-districts, and waste processing facilities are suboptimal. This impacts the adequacy and efficiency of waste management. Furthermore, human resources are inadequate in both quantity and competence, resulting in suboptimal waste management effectiveness and accuracy.

This study also identified key inhibiting factors in waste management, including limited resources (budget, infrastructure, and human resources), difficult-to-reach geographic areas, technical operational constraints such as fleet age and high operational costs, low public awareness and participation, and suboptimal institutional and cross-sectoral coordination.

This study concludes that despite paradigm shifts and improvement efforts, waste management policies in Hulu Sungai Tengah Regency are ineffective, primarily due to constraints in planning, budgeting, implementation, availability of facilities and infrastructure, and human resource adequacy. This study provides recommendations for strengthening data-driven planning, increasing performance-based budgeting, optimizing the implementation of the 3Rs, adding waste management facilities and infrastructure, increasing and enhancing the competency of human resources for waste management, enhancing education and outreach on household waste management by involving all elements of the community, and strengthening multi-stakeholder collaboration in waste management and reduction. These recommendations are expected to increase policy effectiveness and support the achievement of sustainable waste management targets.

Keywords: policy evaluation, waste management, William N. Dunn, policy implementation, Hulu Sungai Tengah.

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, jumlah penduduk tercatat sebanyak 258.721 jiwa (BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021), dan meningkat menjadi 269.599 jiwa pada tahun 2024 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,81% per tahun selama periode 2020–2024 (BPS Kabupaten Hulu

Sungai Tengah, 2025). Pertumbuhan penduduk tersebut berimplikasi langsung terhadap meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat, yang selanjutnya berdampak pada peningkatan volume timbulan sampah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mendefinisikan sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sementara itu, menurut SNI 19-2454-2002, timbulan sampah diartikan sebagai jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dalam satuan volume atau berat per kapita per hari, per luas bangunan, atau per panjang jalan. Satuan timbulan sampah umumnya dinyatakan dalam kilogram per orang per hari, sedangkan untuk perpanjangan jalan dinyatakan dalam liter per satuan panjang jalan.

Data Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan bahwa timbulan sampah pada tahun 2021 mencapai 37.773,27 ton per tahun dan meningkat menjadi 38.070,08 ton per tahun pada tahun 2022. Peningkatan jumlah penduduk terbukti berbanding lurus dengan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat dan volume timbulan sampah (Muara Torang Hadomuan & Retnowati WD Tuti, 2022). Selain itu, peningkatan aktivitas produksi dan konsumsi turut mendorong bertambahnya jumlah, jenis, serta keberagaman karakteristik timbulan sampah (Yulia Hendra, 2016), yang hingga saat ini masih didominasi oleh sampah berbahan plastik. Penggunaan plastik sekali pakai seperti kemasan, kantong, dan pembungkus masih banyak ditemukan dalam aktivitas sehari-hari masyarakat.

Berdasarkan sumbernya, timbulan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah didominasi oleh sampah rumah tangga sebesar 45,26%, diikuti oleh sampah dari pasar dan kegiatan perdagangan lainnya sebesar 42,67%, perkantoran sebesar 5,17%, jalan dan fasilitas umum sebesar 3,88%, serta sumber lainnya sebesar 3,02% (DLHP Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2022). Dominasi sampah rumah tangga dan pasar menunjukkan bahwa pengelolaan sampah pada tingkat sumber menjadi faktor kunci dalam upaya pengurangan timbulan sampah secara keseluruhan.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga menghadapi berbagai permasalahan dalam pengelolaan sampah. Penanganan sampah yang belum optimal dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah akibat penumpukan atau pembuangan sampah sembarangan, pencemaran udara akibat pembakaran sampah, maupun pencemaran air akibat pembuangan sampah ke sungai. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat, bau tidak sedap, penurunan kualitas estetika lingkungan, serta banjir akibat tersumbatnya saluran air (Yulia Hendra, 2016). Permasalahan ini sering kali berawal dari perilaku penghasil sampah yang belum melakukan pengelolaan secara baik, seperti tidak tersedianya tempat sampah di rumah tangga dan kebiasaan membuang atau membakar sampah secara tidak terkendali (Direktorat Sanitasi, 2023).

Sebagai respons terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan. Fatwa tersebut menegaskan kewajiban setiap individu dan pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan, melarang pembuangan sampah sembarangan, serta mendorong pengelolaan dan daur ulang sampah sebagai bagian dari upaya kemaslahatan umat. Rekomendasi fatwa tersebut juga menekankan pentingnya pembinaan masyarakat, pelibatan seluruh pemangku kepentingan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah.

Sejalan dengan fatwa tersebut, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengelolaan sampah

mencakup seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pengendalian timbulan sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir, dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, lingkungan, ekonomi, teknologi, dan partisipasi masyarakat (Direktorat Sanitasi, 2023).

Pada tingkat daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, mulai dari penetapan kebijakan dan strategi, penyediaan sarana prasarana, pemantauan dan evaluasi, hingga pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat. Namun demikian, hingga tahun 2020 paradigma pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih berorientasi pada pendekatan akhir dengan pola kumpul–angkut–buang. Sejak tahun 2021, seiring dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018, paradigma pengelolaan sampah mulai bertransformasi menjadi kumpul–angkut–pilah–buang, dan pada tahun 2023 berkembang menjadi kumpul–angkut–pilah–olah–buang.

Perubahan paradigma tersebut berdampak positif terhadap capaian pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Namun demikian, capaian yang diperoleh masih belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021, target pengelolaan sampah sebesar 98% hanya terealisasi sebesar 72,35%. Tahun 2022 menunjukkan capaian sebesar 77,31% dari target 99%, sedangkan pada tahun 2023 capaian meningkat menjadi 85,31% namun masih berada di bawah target 99%. Adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara target dan realisasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai tantangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang komprehensif untuk menilai sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah telah diimplementasikan serta faktor-faktor yang memengaruhi pencapaiannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

METODE

1. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** dengan **tipe penelitian deskriptif**. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi dan kinerja kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena kebijakan secara komprehensif melalui pengumpulan data langsung di lapangan tanpa menggunakan prosedur statistik (Strauss & Corbin dalam Afrizal, 2017).

Penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan faktual mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, termasuk mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta dukungan sarana prasarana dan sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah **evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah**. Evaluasi dilakukan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn (dalam Subarsono, 2022) dan dikembangkan oleh Rodiyah et al. (2022) serta Meutia (2017), yang meliputi:

1. efektivitas,
2. efisiensi,

3. kecukupan,
4. pemerataan,
5. responsivitas, dan
6. ketepatan.

Evaluasi kebijakan difokuskan pada seluruh tahapan pelaksanaan pengelolaan sampah, yaitu tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengelolaan sampah, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kecukupan sumber daya manusia pengelola sampah.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ditetapkan sebagai informan kunci. Informan pendukung berasal dari unsur kecamatan dan desa pada tiga karakteristik wilayah, yaitu kawasan rawa (Kecamatan Labuan Amas Utara), kawasan dataran rendah/perkotaan (Kecamatan Barabai), dan kawasan dataran tinggi atau pegunungan (Kecamatan Hantakan dan Kecamatan Batang Alai Timur).

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan sampah. Informan berasal dari instansi pemerintah daerah, pelaksana kebijakan, pengelola bank sampah dan TPS3R, serta aparat kecamatan dan desa.

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, antara lain peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah, dokumen perencanaan dan laporan pengelolaan sampah, serta literatur yang relevan. Data sekunder digunakan untuk memperkuat dan memverifikasi data primer serta memberikan gambaran kondisi eksisting wilayah penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, sedangkan wawancara tidak terstruktur digunakan untuk menggali informasi secara lebih mendalam dan kontekstual. Informan wawancara berjumlah 16 orang yang terdiri atas pejabat dinas terkait, fasilitator pengelolaan sampah, camat, serta pengelola bank sampah dan TPS3R.

2. Observasi

Observasi dilakukan terhadap aktivitas pengelolaan sampah sebagai bentuk implementasi kebijakan, khususnya pada tiga wilayah kecamatan dengan karakteristik yang berbeda. Observasi bertujuan untuk memperoleh data faktual dan menguji keabsahan informasi yang diperoleh dari wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen tertulis, foto, serta data elektronik yang relevan dengan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan menyederhanakan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi untuk memudahkan pemahaman terhadap pola dan hubungan antarfenomena. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung serta diverifikasi untuk memastikan keabsahan dan konsistensi makna data.

PEMBAHASAN

Evaluasi Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum mampu mendukung pencapaian layanan persampahan secara optimal. Meskipun pemerintah daerah telah melakukan pemenuhan sarana secara bertahap, keterbatasan jumlah armada, usia kendaraan yang relatif tua, serta belum meratanya fasilitas pemilahan di sumber menyebabkan kinerja operasional belum efektif, khususnya di wilayah pedesaan.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada rendahnya efektivitas dan efisiensi layanan persampahan. Minimnya tempat sampah terpilah di rumah tangga, fasilitas umum, dan kawasan strategis menyebabkan pemilahan di sumber tidak berjalan optimal. Selain itu, belum tersedianya armada khusus pengangkutan sampah organik menyebabkan sampah yang telah dipilah berpotensi tercampur kembali dalam proses pengangkutan, sehingga mengurangi manfaat pemilahan dan meningkatkan beban pengolahan di hilir.

Dari perspektif evaluasi kebijakan William N. Dunn, efektivitas sarana dan prasarana dinilai masih rendah karena fasilitas yang tersedia belum mampu menghasilkan output pengelolaan sampah sesuai target kebijakan. Efisiensi juga belum tercapai secara optimal, mengingat keterbatasan sarana menyebabkan beban kerja petugas meningkat, waktu operasional menjadi lebih panjang, dan biaya pemeliharaan armada semakin tinggi.

Ditinjau dari aspek kecukupan (adequacy), sarana prasarana dasar pengelolaan sampah—seperti wadah pemilahan, fasilitas pengolahan organik dan anorganik, serta armada pengangkut—belum tersedia dalam jumlah yang memadai dan belum menjangkau seluruh wilayah. Ketimpangan distribusi sarana prasarana antara wilayah perkotaan dan pedesaan menunjukkan bahwa aspek pemerataan (equity) juga belum terpenuhi.

Responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan sarana prasarana di lapangan tergolong cukup, ditunjukkan dengan adanya identifikasi kebutuhan oleh fasilitator dan pelaksana teknis. Namun, keterbatasan anggaran menyebabkan pemenuhan kebutuhan tersebut berjalan lambat. Sementara itu, dari sisi ketepatan (appropriateness), jenis sarana yang direncanakan—seperti tempat sampah terpilah, komposter, mesin press, RDF, dan armada organik—telah sesuai dengan karakteristik permasalahan persampahan daerah, tetapi implementasinya belum konsisten dan belum didukung pendanaan yang memadai.

Secara keseluruhan, evaluasi menunjukkan bahwa keterbatasan sarana prasarana menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Evaluasi Kecukupan Sumber Daya Manusia (SDM)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecukupan sumber daya manusia (SDM) pengelola sampah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih belum memenuhi kebutuhan pelayanan persampahan secara menyeluruh. Dengan jumlah total sekitar 320 petugas, sebagian besar berstatus tenaga kontrak, kapasitas SDM tersebut dinilai belum sebanding dengan luas wilayah pelayanan yang mencakup 11 kecamatan dan 169 desa/kelurahan.

Secara kuantitatif, jumlah SDM yang tersedia mendekati standar minimal nasional. Namun, jika ditinjau berdasarkan fungsi teknis operasional, terjadi ketimpangan yang signifikan. Kekurangan paling mencolok terdapat pada petugas penyapuan, pengelola TPS3R, petugas TPA, serta fasilitator pengurangan sampah. Ketidakseimbangan ini menyebabkan banyak fasilitas pengolahan tidak beroperasi optimal dan kegiatan edukasi masyarakat tidak menjangkau seluruh wilayah.

Dari sisi efektivitas, keterbatasan SDM teknis menghambat pencapaian target kebijakan pengelolaan sampah, baik dalam pelayanan kebersihan harian maupun pengurangan sampah dari sumber. Efisiensi pengelolaan SDM juga belum optimal karena distribusi petugas belum sepenuhnya mempertimbangkan beban kerja, volume timbulan sampah, dan kepadatan penduduk di masing-masing kecamatan.

Aspek kecukupan SDM dinilai belum terpenuhi, terutama pada unit-unit yang berperan langsung dalam pengurangan dan pengolahan sampah. Jika dirata-ratakan, jumlah petugas yang tersedia per desa/kelurahan masih sangat terbatas untuk mendukung layanan persampahan yang efektif. Kondisi ini juga berdampak pada rendahnya responsivitas layanan terhadap keluhan masyarakat serta keterbatasan kapasitas edukasi dan pendampingan perilaku pemilahan sampah.

Dari perspektif keadilan (equity), distribusi SDM antarwilayah belum proporsional. Kecamatan dengan kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi tinggi membutuhkan lebih banyak petugas, namun belum mendapatkan alokasi yang memadai. Sementara itu, ketepatan kebijakan SDM menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada jumlah total SDM, melainkan pada komposisi dan distribusi yang belum sesuai dengan kebutuhan teknis di lapangan. Dengan demikian, evaluasi menunjukkan bahwa pengelolaan SDM persampahan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih menghadapi tantangan struktural yang berdampak pada efektivitas, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas kebijakan pengelolaan sampah.

Faktor Penghambat Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat yang saling terkait, meliputi aspek sumber daya, geografis, teknis operasional, dan kelembagaan.

Dari aspek sumber daya, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi hambatan utama. Sebagian besar masyarakat masih memandang pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab pemerintah, sehingga praktik pemilahan dan partisipasi dalam program 3R belum berjalan optimal. Kondisi ini meningkatkan volume sampah yang masuk ke TPA dan menghambat upaya pengurangan dari sumber.

Aspek geografis juga berperan signifikan, terutama pada wilayah dengan kondisi topografi pegunungan dan aksesibilitas terbatas. Keterbatasan infrastruktur jalan menyebabkan armada pengangkut tidak dapat menjangkau seluruh wilayah, sehingga pelayanan persampahan tidak merata dan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan di daerah yang tidak terlayani.

Dari sisi teknis operasional, usia armada yang relatif tua, keterbatasan suku cadang, serta meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga bahan bakar menghambat kelancaran pengangkutan dan pengolahan sampah. Minimnya fasilitas pemilahan dan pengolahan lanjutan semakin memperkuat ketergantungan pada TPA sebagai solusi utama.

Aspek kelembagaan menunjukkan bahwa pengelolaan sampah, khususnya bank sampah dan TPS3R, masih menghadapi kendala berupa minimnya regulasi pendukung, lemahnya insentif, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor. Ketergantungan pada inisiatif komunitas tanpa dukungan kebijakan yang kuat menyebabkan keberlanjutan program sulit terjaga.

Secara keseluruhan, faktor-faktor penghambat tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis, tetapi juga oleh dimensi sosial, kelembagaan, dan kontekstual wilayah. Oleh karena itu, penguatan kebijakan perlu dilakukan secara sistemik dan terintegrasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum berjalan secara efektif. Perubahan paradigma pengelolaan sampah dari pola kumpul–angkut–buang menuju kumpul–angkut–pilah–olah–buang belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Selama tiga tahun berturut-turut, capaian pengurangan dan pengelolaan sampah terolah masih berada jauh di bawah target, yang menunjukkan bahwa kebijakan belum efektif dalam mencapai tujuan utamanya.

Didinjau dari aspek efisiensi, pemanfaatan sumber daya berupa anggaran, sarana dan prasarana, serta tenaga kerja belum menghasilkan output yang sebanding. Keterbatasan infrastruktur pemilahan dan pengolahan, dominasi sistem transportasi sampah konvensional, serta keterbatasan jumlah dan kinerja bank sampah dan TPS 3R menyebabkan biaya dan tenaga yang dikeluarkan belum berbanding lurus dengan hasil yang dicapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi kebijakan pengelolaan sampah masih rendah.

Dari aspek kecukupan, meskipun kebijakan dan regulasi telah mengatur arah pengurangan sampah dari sumber, implementasinya belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh. Ketiadaan pedoman teknis operasional yang rinci, keterbatasan fasilitas pengolahan, serta rendahnya partisipasi masyarakat menyebabkan kebijakan belum mampu menjawab seluruh kebutuhan sistem pengelolaan sampah di lapangan.

Aspek pemerataan juga belum terpenuhi secara optimal. Layanan persampahan belum menjangkau seluruh kecamatan dan desa secara merata, dengan kecenderungan fasilitas pemilahan dan pengolahan terpusat di wilayah perkotaan. Sejumlah desa dan kelurahan belum memperoleh akses sarana pemilahan, serta distribusi armada pengangkut sampah yang belum proporsional. Kondisi ini mengakibatkan manfaat kebijakan belum dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dari sisi responsivitas, kebijakan pengelolaan sampah belum sepenuhnya mampu merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Keluhan terkait ketidakteraturan jadwal pengangkutan, kondisi TPS yang sering penuh, serta minimnya kegiatan sosialisasi dan edukasi pengurangan sampah menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya tanggap terhadap kebutuhan para pemangku kepentingan.

Sementara itu, dari aspek ketepatan, secara konseptual kebijakan dan paradigma pengelolaan sampah yang diterapkan telah sejalan dengan prinsip 3R dan kebijakan nasional. Namun, ketepatan

tersebut belum tercermin dalam implementasi di lapangan. Target kebijakan yang relatif tinggi belum sepenuhnya disesuaikan dengan kapasitas daerah, kolaborasi lintas sektor masih terbatas, serta kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana belum memadai. Dengan demikian, kebijakan dinilai tepat secara konsep, tetapi belum tepat secara implementatif.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan sejumlah faktor penghambat utama dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dari aspek sumber daya, keterbatasan sarana dan prasarana persampahan, kekurangan dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta keterbatasan anggaran menjadi hambatan signifikan dalam penyediaan layanan persampahan yang merata dan berkelanjutan. Kondisi geografis wilayah, khususnya pada daerah pegunungan dan kawasan rawa dengan aksesibilitas terbatas, turut mempersulit pelayanan pengangkutan sampah secara rutin dan menyeluruh.

Pada aspek teknis operasional, permasalahan berupa usia armada yang relatif tua, keterbatasan suku cadang, meningkatnya biaya operasional, serta minimnya fasilitas pendukung pemilahan dan pengolahan sampah menjadi kendala utama. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat juga memperkuat hambatan implementasi kebijakan, yang tercermin dari masih ditemukannya praktik pembuangan sampah sembarangan, terutama di wilayah yang belum terlayani secara optimal. Sementara itu, dari aspek kelembagaan, lemahnya koordinasi lintas sektor, belum jelasnya pemisahan peran regulator dan operator, serta belum terintegrasinya peran pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan menyebabkan pengelolaan sampah cenderung bersifat sektoral dan belum membentuk sistem yang terpadu dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J.E. (1979) *Public policy making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Anggraini, F. (2011) ‘Aspek kelembagaan pada pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah regional’, *Jurnal Permukiman*, 6(2), pp. 65–74.
- Asmu'i, A. (2024) *Bahan ajar mata kuliah implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. [Unpublished teaching material].
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah (2021) *Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam angka 2021*. Barabai: BPS. ISSN 0215-6482.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah (2023) *Indikator kesejahteraan rakyat Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2023*. Barabai: BPS.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah (2025) *Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam angka 2025*. Barabai: BPS. ISSN 0215-6482.
- Badan Standardisasi Nasional (1995) *Spesifikasi timbulan sampah untuk kota kecil dan kota sedang di Indonesia (SNI 19-3983-1995)*. Jakarta: BSN.
- Damanhuri, E. and Padmi, T. (2010) *Pengelolaan sampah*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (2022) *Dokumen IKPLHD Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2022*. Barabai: DLHP.
- Dunn, W.N. (2013) *Pengantar analisis kebijakan publik*. Translated by S. Wibawa et al. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gobai, K.R.M., Surya, B. and Syafri (2021) *Pengelolaan sampah perkotaan*. Gowa: Pusaka Almaida.
- Hildawati (2018) ‘Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada kecamatan di Kota Dumai’, *Jurnal Publika*, 5(1), pp. 332–348.

- Irianto, Y.B. (2012) *Kebijakan pembaharuan pendidikan: konsep, teori, dan model*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ismail (2017) *Etika pemerintahan: norma, konsep, dan praktik*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Isnaini Rodiyah, I.U. Choiriyah and Sukmana, H. (2022) *Buku ajar kebijakan publik*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Joga, N. (2023) *Kota hijau dan teduh menuju kota berkelanjutan*. Jakarta: Kemitraan Kota Hijau.
- Kadji, Y. (2015) *Formulasi dan implementasi kebijakan publik*. Gorontalo: UNG Press.
- Kumorotomo, W., Imbarudin, A. and Rukmana, N. (2015) *Etika publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Maulana, D. and Nugroho, A. (2019) *Kebijakan publik: cara mudah memahami kebijakan publik*. Serang: CV AA Rizky.
- Majelis Ulama Indonesia (2014) *Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah*. Jakarta: MUI.
- Moleong, L.J. (2000) *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J. (2018) *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustari, N. (2015) *Pemahaman kebijakan publik*. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Mustopadidjaja, A.R. (2021) *Manajemen proses kebijakan publik*. Jakarta: LAN RI.
- Nugroho, R. (2015) *Kebijakan publik di negara-negara berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Parsons, W. (2008) *Public policy: pengantar teori dan praktik analisis kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Pramono, J. (2020) *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Surakarta: UNISRI Press.
- Rahma Puspasari, G. and Mussadun (2016) ‘Peran kelembagaan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Trenggalek’, *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 12(4), pp. 385–399.
- Riduwan (2010) *Metode dan teknik menyusun proposal penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Rijali, A. (2018) ‘Analisis data kualitatif’, *Jurnal Alhadharah*, 17(33), pp. 81–95.
- Sinambela, L.P. (2006) *Reformasi pelayanan publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono (2014) *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2018) *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2020) *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2020) *Cara mudah menyusun skripsi, tesis, dan disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2020) *Analisis kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Widanti, N.P.T. (2022) *Prinsip administrasi publik*. Bali: Jagat Langsit Sukma.
- Winarno, B. (2012) *Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus*. Jakarta: Buku Seru.
- Yulia Hendra (2016) ‘Perbandingan sistem pengelolaan sampah di Indonesia dan Korea Selatan’, *Jurnal Aspirasi*, 7(1), pp. 77–91.